

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini menghadapkan bangsa Indonesia pada berbagai gejala sosial, mudahnya mengakses informasi, terjadinya krisis kepemimpinan yang membuat nilai-nilai dan budaya dari luar dapat dengan mudah diserap tanpa adanya penyaring. Perubahan nilai dan budaya secara cepat dan terus menerus terjadi di dalam proses perjalanan berbangsa dan bernegara. Krisis moneter yang pernah dialami bangsa Indonesia, kemudian disusul krisis ekonomi, sosial dan politik yang kini terus menjalar tertanam dalam krisis moral, menjadikan bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensional sehingga nilai-nilai luhur yang selama ini dipertahankan seperti sopan santun, ramah tamah, mengutamakan musyawarah dan lain-lain. Kini, nilai-nilai luhur tersebut secara perlahan hilang, hanyut dilanda deras arus modernisasi dan globalisasi. Secara sadar atau tidak, dapat mempengaruhi pula pola pikir serta cara pandang masyarakat itu sendiri dalam menghadapi dan menyikapi suatu permasalahan dan fenomena yang melingkupi bangsa ini.

Tidak kalah memperihatinkan adalah dengan adanya fenomena konflik yang bersifat vertikal dan horizontal yang ditandai dengan kekerasan dan kerusuhan yang terjadi dimana-mana. Bentrok antar suku maupun agama tidak dapat dihindari. Dari masyarakat, elite politik sampai pada kalangan pelajar dan mahasiswa menunjukkan

lunturnya nilai-nilai luhur bangsa. Dan yang menjadi primadona di negeri ini adalah korupsi, sewajarnya korupsi menjadi salah satu musuh yang paling ditakuti. Bukan hanya menghancurkan perekonomian negara, korupsi juga juga merusak tatanan kehidupan, lembaga-lembaga negara, stabilitas, dan keamanan masyarakat, keadilan, hukum, nilai-nilai demokrasi serta mengacaukan pembangunan.¹ Korupsi yang seakan sudah berakar dan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2009 ini naik menjadi 2,8% dari 2,6% pada tahun 2008. Dengan skor ini, peringkat Indonesia naik secara signifikan, yakni berada di urutan 111 dari 180 negara (naik 15 posisi dari tahun lalu) yang disurvei IPKnya oleh Transparency International (TI).²

Melalui pidato budaya yang disampaikan oleh Mochtar Lubis, ia menggambarkan beberapa watak manusia Indonesia salah satunya adalah mempunyai watak yang lemah atau karakter yang kurang kuat. Manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan atau memperjuangkan keyakinannya. Akan sangat mudah, apalagi jika dipaksa dan demi untuk “*survive*” bersedia mengubah keyakinannya.³

Berdasarkan fenomena tersebut dan menyadari akan pentingnya suatu pendidikan yang mampu membentuk serta menanamkan pola pikir, sikap, dan perilaku untuk mencapai yang dicita-cita bangsa, menjadikan manusia Indonesia, manusia yang berkarakter. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

¹ <http://theceli.com>, *Pemberantasan Korupsi di “Negeri Komisi”* .html, diakses pada tanggal 28-12-2011 pada pukul 10.35

² <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=942>, diakses pada tanggal 28-12-2011 pada pukul 10.35

³ Lubis, Mochtar, *Manusia Indonesia sebuah pertanggungjawaban*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm.34

Pendidikan Nasional telah ditegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁴

Hal tersebut menjelaskan, bahwa fungsi pendidikan yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Pendidikan sebagai wahana utama yang mengambil peranan penting dalam menanamkan dan membentuk karakter (*character building*) masyarakat suatu bangsa. Karakter suatu masyarakat akan menentukan kualitas sumber daya manusia, maka akan dapat menentukan kemajuan suatu bangsa. Untuk membentuk dan membangun karakter, tidak dapat dengan mudah didapat begitu saja, melainkan perlu dibentuk dan dibina sejak dini, yaitu dengan memperkenalkannya melalui jalur pendidikan.

Pendapat lain yang serupa dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dengan tegas menyatakan bahwa “pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (*kekuatan batin, karakter*), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak.”⁵ namun disayangkan, sistem pendidikan yang ada sekarang ini secara umum masih berorientasi pada pengembangan otak kiri (kognitif) dan kurang

⁴ P. Amin, *Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), hlm. 2

⁵ Sri Martini Meilanie, *Pengantar Ilmu Pendidikan MKDK Program Mata Kuliah Dasar Kependidikan*, (Jakarta: FIP-MKDK, 2009), hlm. 37

memperhatikan pengembangan otak kanan (afektif, empati, dan rasa). Masih tingginya standar hasil belajar yang menjadi patokan dalam menentukan kelulusan adalah bukti bahwa titik sentral pendidikan masih mengandalkan pengetahuan kognitif saja, yang seakan mendominasi pendidikan di negeri ini. Sedangkan untuk pengembangan karakter lebih berkaitan dengan mengoptimalkan fungsi otak kanan hanya sebagai sampingan atau selingan dalam proses pembelajaran.

Untuk menanamkan dan memperkuat karakter kejujuran maka dibutuhkan sarana yang tepat dalam mengembangkan nilai-nilai kejujuran siswa, salah satunya adalah dengan penerapan kantin kejujuran. Dengan adanya kantin kejujuran sebagai media dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran diharapkan dapat memberi pengalaman nyata kepada para siswa. Kantin kejujuran adalah sebuah warung kejujuran yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. KPK, menginisiasi kantin kejujuran untuk menanamkan moral jujur dari usia dini. Kantin kejujuran saat ini merambah di beberapa sekolah dari berbagai jenjang pendidikan diantaranya terdapat di Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Perguruan Tinggi (Universitas).⁶

Kantin kejujuran menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi korupsi yang menjadi penyakit selama bertahun-tahun karena kejujuran menjadi obat dan modal yang paling manjur dalam menghadapi virus korupsi.

⁶ <http://mmugm.ac.id/index.php/sustainabilityindex/929-kantin-kejujuran-untuk-pembangunan-moral-profesional-manajemen-dan-entrepreneurship-bangsa-indonesia-yang-berkelanjutan> (Google dengan kata kunci “kantin jujur” diakses pukul 15.03 WIB diakses tgl 29-12-2011)

Fokus penelitian ini terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dari tingkat kemampuan kognitif, daya berpikir usia SMA sudah sampai pada taraf menganalisis, pemahaman dan penalaran sehingga diharapkan mampu menyikapi suatu fenomena yang terjadi. Dari segi pengetahuan yang dimiliki tersebut, siswa sudah dapat menentukan dampak baik ataupun buruk dari perilaku mereka bagi lingkungan maupun dirinya sendiri.

Salah satu sekolah yang menerapkan kantin kejujuran adalah SMA Negeri 25 Jakarta Pusat. SMA Negeri 25 merupakan sekolah yang terkenal memiliki kedisiplinan yang tinggi, hal tersebut tergambar dari salah satu sistem perizinan yang harus dilalui oleh siswa bila ingin meminta izin keluar atau tidak mengikuti jam pelajaran. Siswa diwajibkan mengisi lembar keterangan, lengkap dengan tandatangan guru yang mengajar pada jam pelajaran saat itu dan tandatangan guru piket yang sedang bertugas. Peraturan lain yang menggambarkan kedisiplinan selain dalam hal perizinan adalah ketaatan siswa dalam berseragam dan kesopanan terhadap guru dan staff sekolah, jarang ditemukan siswa yang tidak berpakaian seragam dengan lengkap dan rapih, selain itu siswa dibiasakan untuk mencium tangan guru. Dari budaya kedisiplinan dan kesopanan tersebut membuat SMA Negeri 25 nampak berbeda dari sekolah yang lainnya. Kedisiplinan yang diterapkan di SMA Negeri 25 adalah upaya lain yang dilakukan pihak sekolah dalam membentuk karakter generasi muda bangsa.

Dengan menerapkan kedisiplinan, apakah mampu mengimbangi berkembangnya zaman serta fenomena yang melingkupi bangsa ini, baik dari segi pendidikan, pergaulan, kemudahan-kemudahan informasi, kemajuan teknologi

sampai pada perkembangan psikologi siswa. Dan tidak banyak sekolah yang menerapkan kantin kejujuran di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kantin kejujuran yang terdapat di SMA Negeri 25 Jakarta Pusat, beroperasi cukup lama yaitu kurang lebih 8 tahun, dimulai pada saat KPK mensosialisasikan pendidikan antikorupsi dikalangan pelajar tahun 2004. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk meneliti bagaimana menanamkan nilai-nilai kejujuran para siswa melalui sarana kantin kejujuran di SMA Negeri 25 Jakarta Pusat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah peranan generasi muda dalam perkembangan suatu bangsa?
2. Apakah yang dimaksud dengan menanamkan kejujuran?
3. Apa yang dimaksud dengan kantin kejujuran?
4. Bagaimana kantin kejujuran di SMA Negeri 25 Jakarta Pusat dapat menanamkan kejujuran pada siswa?
5. Apakah siswa menampilkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari?

C. Fokus Penelitian

Hal yang akan diteliti lebih mendalam pada penelitian ini difokuskan di SMA Negeri 25 Jakarta Pusat dan meneliti bagaimana menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada para siswa melalui sarana kantin kejujuran sekolah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana nilai-nilai kejujuran ditanamkan melalui kantin kejujuran di SMA Negeri 25 Jakarta Pusat?”

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi dunia pendidikan Indonesia.
2. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan peneliti khususnya mengenai penanaman nilai-nilai kejujuran melalui kantin kejujuran sekolah.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi penelitian berikutnya yang sejenis.